

Suksesi Kepemimpinan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun : Relevansinya dengan Kepemimpinan Era Reformasi di Indonesia

Christy Pransisca ¹, Hery Noer Aly ², Ismail ³

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

christymanna8@gmail.com, hery.noer.aly@gmail.com,

ismail@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: This research discusses the concept of leadership succession according to Ibnu Khaldun which focuses on the process of cyclical change of power and is influenced by social solidarity (asabiyah), military strength, leader legitimacy, economic factors, and external influences. Ibn Khaldun emphasized that strong leadership originates from groups with high solidarity, but the weakening of the asabiyah will cause the downfall of the dynasty and trigger succession. This research also examines the relevance of Ibnu Khaldun's theory in the leadership context of the reform era in Indonesia, where political dynamics are influenced by internal and external factors, including political parties, the economy and social inequality. The research was carried out through a descriptive qualitative approach with library research methods, using primary and secondary sources which included the works of Ibnu Khaldun and related literature. Data analysis was carried out using the content analysis method, which aims to understand Ibn Khaldun's views in the context of political and religious sociology. The research results show that Ibn Khaldun's theory of leadership succession provides a relevant perspective in understanding political stability, changes in power, and the challenges faced in maintaining government in the modern era.

Keywords: Leadership Succession, Social Inequality, Reformation Era, Leadership Dynamics.

Abstrak: Penelitian ini membahas konsep suksesi kepemimpinan menurut Ibnu Khaldun yang berfokus pada proses pergantian kekuasaan secara siklus dan dipengaruhi oleh solidaritas sosial (asabiyah), kekuatan militer, legitimasi pemimpin, faktor ekonomi, serta pengaruh eksternal. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kepemimpinan yang kuat berawal dari kelompok dengan solidaritas tinggi, namun melemahnya asabiyah akan menyebabkan kejatuhan dinasti dan memicu suksesi. Penelitian ini juga mengkaji relevansi teori Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan era reformasi di Indonesia, di mana dinamika politik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk partai politik, ekonomi, dan ketimpangan sosial. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode riset pustaka (library research), menggunakan sumber primer dan sekunder yang mencakup karya-karya Ibnu Khaldun serta literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi, yang bertujuan untuk memahami pandangan Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi politik dan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori suksesi kepemimpinan Ibnu Khaldun memberikan perspektif yang relevan dalam memahami stabilitas politik, perubahan kekuasaan, dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga pemerintahan di era modern.

Kata kunci: Suksesi Kepemimpinan, Ketimpangan Sosial, Era Reformasi, Dinamika Kepemimpinan.

Pendahuluan

Ibn Khaldun adalah salah satu intelektual besar dalam sejarah peradaban Islam, yang terkenal dengan kontribusinya di bidang filsafat sejarah, sosiologi, dan politik. Dilahirkan pada abad ke-14 di Tunisia, Ibn Khaldun dikenal melalui karyanya yang monumental, *Muqaddimah*, yang merupakan bagian pendahuluan dari kitab *Kitab al-'Ibar*. Dalam karya ini, ia menyajikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan masyarakat dan peradaban.¹

Salah satu konsep utama dalam pemikiran Ibn Khaldun adalah *ashabiyah*, yang secara harfiah berarti "solidaritas sosial" atau "rasa kebersamaan". Menurutnya, *ashabiyah* adalah elemen penting yang memungkinkan sebuah kelompok atau bangsa untuk bersatu dan membangun pemerintahan yang stabil.

Pemikiran Ibn Khaldun tentang kepemimpinan ideal menekankan kualitas-kualitas penting seperti keadilan, keterbukaan, dan kemampuan untuk menjaga solidaritas sosial (*ashabiyah*) di masyarakat. Kepemimpinan yang menjaga nilai-nilai tersebut dianggap lebih mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, solid, dan mendapat dukungan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep kepemimpinan ideal Ibn Khaldun bisa menjadi cermin dan inspirasi bagi para pemimpin di era Reformasi untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Pemikiran Ibn Khaldun memberikan perspektif kritis tentang perlunya kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, yang relevan dengan upaya Indonesia menuju pemerintahan yang lebih baik.

Pemikiran Ibn Khaldun tentang kepemimpinan mengandung prinsip-prinsip

yang tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan di Indonesia. Konsep moralitas, tanggung jawab sosial, serta kesejahteraan rakyat adalah beberapa prinsip utama yang sangat dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan yang berintegritas dan mendapatkan dukungan publik yang kuat.²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pemikiran kepemimpinan Ibn Khaldun dengan praktik kepemimpinan di Indonesia saat ini, serta untuk mengidentifikasi potensi kontribusi pemikiran tersebut dalam menghadapi tantangan kepemimpinan modern di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kepemimpinan Ibn Khaldun yang masih relevan, seperti moralitas, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat, serta bagaimana penerapannya dapat membantu memperbaiki masalah kepemimpinan yang terjadi di era Reformasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep suksesi kepemimpinan menurut pemikiran Ibnu Khaldun?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi suksesi kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana relevansi teori suksesi kepemimpinan Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan di era reformasi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang konsep suksesi kepemimpinan menurut pemikiran Ibnu Khaldun, tentang faktor-faktor yang memengaruhi suksesi kepemimpinan dalam

¹ Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture* (Chicago: University of Chicago Press, 1964), 25–30.

² Juan Carlos García, *Ibn Khaldun's Concept of Leadership and Its Modern Relevance* (London: Routledge, 2023), 45–50.

pandangan Ibnu Khaldun dan relevansi teori suksesi kepemimpinan Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan di era reformasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis (*analytical descriptive method*), yaitu dengan mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis. Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (studi pustaka) yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu dengan menelaah objek material karya-karya, dan sumber data yang diambil dan dikumpulkan dari buku-buku, tulisan-tulisan dan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, nama lengkapnya Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun³, lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M) dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H (19 Maret 1406 M). Ia berasal dari keluarga ilmuwan yang terhormat dan menggabungkan peran sebagai cendekiawan serta pejabat pemerintahan.⁴

Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai dari bimbingan ayahnya, seorang ahli bahasa dan sastra Arab, hingga kemudian belajar dari berbagai ulama terkemuka di Tunisia, Fez, dan Maroko. Ia menguasai Al-Qur'an, hadis, fikih Mazhab Maliki, gramatika Arab, filsafat, serta berbagai ilmu rasional seperti logika, matematika, astronomi, dan politik. Ibnu Khaldun memperoleh berbagai ijazah mengajar dari guru-gurunya, menunjukkan keluasan ilmu dan kecerdasannya.⁵

Seperti tradisi kaum Muslim pada masa itu, ayahnya, Muhammad Ibnu

Muhammad, menjadi guru pertamanya yang mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Ayahnya adalah seorang ulama terkemuka dengan pengetahuan agama yang luas. Di bawah bimbingannya, Ibnu Khaldun mempelajari Al-Qur'an dengan cara membaca dan menghafalnya, serta mendalami ilmu qira'ah sab'ah (tujuh cara membaca Al-Qur'an). Selain itu, ia juga mendapat pelajaran tafsir, hadis, fiqh, dan gramatika bahasa Arab.

Namun, pendidikan langsung dari ayahnya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1349 M, ayahnya meninggal akibat wabah Sampar (Black Death). Kehilangan ini menjadi titik balik bagi Ibnu Khaldun, memaksanya untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan berbagai ulama terkemuka di Tunisia, yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan sastra Arab. Di sana, ia mendalami hadis dan fiqh Mazhab Maliki, serta ilmu bahasa, sastra, logika, dan filsafat. Beberapa guru yang berperan penting dalam pendidikannya antara lain Abdullah Muhammad bin Jabir al-Wadiyashi dalam ilmu hadis, serta beberapa ulama lainnya yang datang ke Tunisia setelah pendudukan Ifriqiyah oleh Sultan Mariniyun.

Pada tahun 1354 M, Ibnu Khaldun hijrah ke Fez, Maroko, mengikuti jejak para ulama dan sastrawan yang lebih dulu berpindah untuk menghindari wabah penyakit. Di Fez, ia kembali menimba ilmu dari sejumlah ulama besar, di antaranya Muhammad bin al-Saffar, Muhammad bin Yahya al-Barji, dan Ibnu al-Khatib.⁶ Ia terus memperluas wawasannya dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu,

³Enan, *Biografi Ibnu Khaldun*, terj. Machnun Husein, h 14

⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, h 1079

⁵Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan. Pengaruhnya*

Terhadap Dunia Ke-3, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2010. h.1080

⁶ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 1999), 37

termasuk politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Pada usia 20 tahun, ia telah menyelesaikan studinya dan memperoleh berbagai ijazah dari para gurunya, yang memberinya otoritas untuk mengajar dan mendalami berbagai ilmu secara mandiri.

Dalam perjalanan kariernya, Ibnu Khaldun terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Pada pertengahan abad ke-14, ia dipercaya untuk menjadi sekretaris di bawah kepemimpinan Abu Muhammad Ibnu Tafragin, seorang Kepala Staf Istana yang memiliki pengaruh besar di Tunisia. Tugas utamanya adalah menulis dokumen resmi dan ungkapan puji syukur dalam naskah pemerintahan. Namun, Ibnu Khaldun tidak merasa puas dengan jabatan tersebut karena lebih tertarik pada dunia intelektual. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya datang ketika ia dipanggil ke istana Sultan di Fez pada tahun 1354 M. Di sana, ia diangkat sebagai penasihat ilmiah dan kemudian mendapat berbagai jabatan penting lainnya.

Selama terlibat dalam politik, Ibnu Khaldun menyaksikan berbagai intrik kekuasaan. Ia memiliki hubungan dekat dengan Muhammad dari Bougie, seorang penguasa yang dimakzulkan dan dipenjara di Fez. Ketika Sultan Abu Inan jatuh sakit, Ibnu Khaldun berupaya membantu Muhammad melarikan diri untuk merebut kembali takhtanya. Namun, rencananya diketahui, sehingga ia dipenjara pada tahun 1357 M. Setelah menulis syair pujian untuk Sultan, ia akhirnya dibebaskan oleh Perdana Menteri setelah kematian Sultan.

Setelah bebas, Ibnu Khaldun kembali terlibat dalam berbagai manuver politik. Ia sempat bergabung dengan al-Mansur sebagai sekretaris, tetapi kemudian berpindah haluan mendukung Abu Salim, yang meminta bantuannya untuk mendapatkan dukungan dari para pemimpin. Setelah Abu Salim berhasil merebut kembali takhtanya pada tahun 1359 M, Ibnu Khaldun diangkat sebagai sekretarisnya. Beberapa tahun kemudian, ia

memperoleh jabatan kehakiman (mazalim), yang mengurus pengaduan dan kejahatan di luar hukum syariah.

Namun, keterlibatannya dalam politik terus membawanya ke berbagai konflik. Pada tahun 1363 M, ia dikirim sebagai duta besar ke Castille untuk bertemu dengan Raja Pedro the Cruel. Pada saat yang sama, ia mulai menulis tentang sejarah keluarganya. Pada tahun 1365 M, ia diundang kembali ke Bougie untuk menjabat sebagai kepala staf istana, menangani urusan negara dan hubungan sultan dengan rakyat. Ia kembali ke Andalusia pada tahun 1365 M karena terjadi konflik antara Fez dan Granada.

Setelah bertahun-tahun terlibat dalam politik, Ibnu Khaldun akhirnya merasa jenuh dengan dunia pemerintahan dan memutuskan untuk meninggalkan politik. Ia memilih untuk kembali fokus pada dunia keilmuan, yang kemudian membawanya pada penciptaan karya terbesarnya, *Muqaddimah*, yang menjadi dasar bagi ilmu sejarah dan sosiologi modern.

Ibnu Khaldun adalah seorang aktivis dan pemikir politik yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam dunia pemerintahan dan konflik politik. Ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, mulai dari Sevilla di Spanyol hingga Damaskus di Suriah, dengan fokus utama di Afrika Utara dan Mesir. Meskipun hidup di masa kemunduran peradaban Islam, ia tetap mampu menghasilkan gagasan-gagasan besar yang berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan.

Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah *Kitab al-Ibar*, yang sering disebut *Tarikh Ibnu Khaldun*. Karya ini menghubungkan sejarah dengan filsafat dan memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan peradaban manusia. Selain itu, ia juga menulis *Muqaddimah*, yang merupakan pendahuluan dari *Kitab al-Ibar*. Buku ini membahas berbagai aspek masyarakat, seperti pemerintahan, ekonomi,

perdagangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan.⁷ *Muqaddimah* dianggap sebagai salah satu karya monumental yang menjadi dasar dalam studi sejarah dan sosiologi modern.

Ibnu Khaldun juga menulis sebuah autobiografi berjudul *Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuh Garban wa Syarqan*, yang berisi perjalanan hidupnya, termasuk pengalaman politik serta berbagai peristiwa penting yang ia alami. Selain itu, ia menghasilkan berbagai karya lain dalam bidang logika, aritmetika, dan filsafat, serta memberikan komentar atas karya-karya pemikir besar seperti Ibnu Rusyd dan Fakhruddin al-Razi.

Pemikiran Ibnu Khaldun memiliki pengaruh yang sangat besar hingga saat ini. Teori-teori yang ia kembangkan, seperti konsep sosial dan siklus peradaban, masih digunakan dalam studi sejarah, politik, dan sosiologi modern. Hal ini menjadikannya salah satu pemikir Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam.

Konsep Suksesi Kepemimpinan Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1332–1406) adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan pemikir politik Muslim yang terkenal melalui karya monumentalnya, *Muqaddimah*. Dalam pemikirannya, konsep suksesi kepemimpinan memiliki aspek penting yang berkaitan dengan teori sosial, politik, dan ekonomi.

Asabiyyah (Solidaritas Sosial) Asabiyyah adalah ikatan sosial yang menjadi dasar utama kekuasaan. Sebuah dinasti atau negara bertahan karena adanya solidaritas sosial yang kuat di antara anggotanya. Suksesi kepemimpinan yang sukses membutuhkan kesinambungan asabiyyah.

Jika solidaritas melemah, pemerintahan akan mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Asabiyyah berfungsi sebagai perekat sosial yang menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, termasuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kelangsungan hidup mereka.⁸

Siklus Dinasti (Teori Siklus Sejarah). Ibnu Khaldun (1332–1406), seorang sejarawan, filsuf, dan sosiolog Muslim terkemuka, dikenal dengan konsep teori siklus sejarah yang dikemukakan dalam karyanya yang monumental, *Muqaddimah*. Teori ini menjelaskan bagaimana peradaban, dinasti, dan negara mengalami proses pertumbuhan, kejayaan, dan kehancuran dalam siklus yang berulang. Menurut Ibnu Khaldun, siklus ini merupakan proses alami yang terjadi dalam sejarah umat manusia.⁹

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa setiap pemerintahan atau dinasti melalui tiga tahap utama. a) tahap awal yaitu pemimpin pertama memiliki asabiyyah tinggi, berani, dan kepemimpinannya bersifat kolektif. b) tahap Tengah yaitu generasi kedua menikmati kemakmuran, tetapi kepemimpinan mulai lebih birokratis. c) tahap akhir yaitu generasi ketiga cenderung lemah dan kehilangan solidaritas, yang menandai kemunduran dinasti. Suksesi yang lemah mempercepat kejatuhan pemerintahan.

Keadilan sebagai Landasan Kepemimpinan. Bagi Ibnu Khaldun, keadilan adalah prinsip utama yang harus ditegakkan oleh pemimpin. Pemimpin yang adil akan memperkuat legitimasi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Keadilan dalam proses suksesi penting untuk mencegah konflik internal dan perebutan

⁷ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 1999), 40

⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Franz Rosenthal (New Jersey: Princeton University Press, 2015), 289.

⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Franz Rosenthal (New Jersey: Princeton University Press, 2015), 313

kekuasaan yang dapat merusak solidaritas sosial.¹⁰

Menurut Ibnu Khaldun, keadilan tidak hanya bermakna dalam konteks hukum, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan sosial dan politik. Keadilan adalah prinsip moral dan etika yang harus diterapkan oleh pemimpin untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Keadilan adalah prinsip utama dalam memastikan legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial: a). keadilan hukum yaitu pemimpin harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi. b). keadilan ekonomi yaitu distribusi kekayaan yang merata menjaga stabilitas sosial. c). keadilan sosial yaitu hak-hak dasar rakyat harus terpenuhi untuk mencegah ketimpangan sosial. Tanpa keadilan, pemerintahan akan kehilangan legitimasi dan mengalami kehancuran.

Peran Agama dalam Kepemimpinan. Agama memainkan peran penting dalam memperkuat *asabiyyah* dan legitimasi kepemimpinan. Ibnu Khaldun (1332–1406) menempatkan agama sebagai salah satu pilar fundamental dalam membangun peradaban dan menjaga keberlangsungan sebuah dinasti atau negara. Dalam karya utamanya, *Muqaddimah*, ia membahas bagaimana agama memberikan pengaruh signifikan dalam aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat. Agama, menurut Ibnu Khaldun, bukan hanya sistem kepercayaan pribadi, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan solidaritas sosial (*asabiyyah*) dan stabilitas politik.¹¹

Beberapa fungsi utama agama menurut Ibnu Khaldun adalah a). penguat solidaritas sosial yaitu agama menciptakan identitas kolektif yang memperkuat

persatuan. b). legitimasi kekuasaan yaitu pemimpin yang berlandaskan agama cenderung lebih adil dan dipercaya rakyat. c). regulasi nilai sosial yaitu agama menetapkan norma etika yang membentuk moralitas masyarakat. d). motivasi perjuangan yaitu agama mendorong masyarakat untuk menghadapi tantangan dan perubahan sosial.

Kemampuan dan Karisma Pemimpin. Ibnu Khaldun dalam karya terkenalnya, *Muqaddimah*, menyatakan bahwa kemampuan dan karisma pemimpin adalah dua elemen yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya memerlukan kemampuan administratif dan politik yang baik, tetapi juga harus memiliki kualitas pribadi yang bisa menginspirasi dan membangkitkan semangat solidaritas sosial di antara rakyatnya.

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kualitas pribadi pemimpin dalam keberhasilan suksesi kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki a). kemampuan administratif dan politik yaitu mampu mengelola negara dengan efisien, menegakkan hukum, dan merancang kebijakan yang efektif. b). kepemimpinan berbasis pengetahuan dan kebijaksanaan yaitu pemimpin harus memiliki wawasan luas dalam politik, hukum, dan ekonomi. c). karisma dan moralitas pemimpin yang memiliki daya tarik dan moralitas tinggi akan lebih mudah memperoleh dukungan dan membangun solidaritas sosial.

Relevansi teori suksesi kepemimpinan Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan di era reformasi di Indonesia.

Asabiyyah dalam Politik Indonesia. Dalam konteks Indonesia, *asabiyyah*

¹⁰Ahmad Syafii Maarif, *Menyelami Pemikiran Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 89

¹¹Syed Farid Alatas, "The Role of Religion in Ibn Khaldun's Social Theory," *Islamic Studies Journal* 29, no. 1 (2023): 35–50.

(solidaritas kelompok) tercermin dalam hubungan kekerabatan, jaringan politik, dan basis dukungan massa. Partai politik, ormas, dan kelompok elite cenderung membentuk solidaritas internal yang kuat untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan.¹²

Menurut Ibnu Khaldun, *asabiyah* adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suksesi kepemimpinan. Keberhasilan transisi kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin baru untuk menjaga solidaritas kelompok, memelihara nilai-nilai bersama, dan menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Jika *asabiyah* melemah, maka suksesi akan sulit dan berpotensi menyebabkan konflik atau keruntuhan dinasti.

Kekuatan Politik dan Militer. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kekuatan militer dalam mempertahankan dan mewariskan kekuasaan. Pemimpin yang kuat secara militer akan lebih mampu menjaga stabilitas politik dan mempertahankan suksesi. Kepemimpinan akan lebih mudah diwariskan jika penguasa mengendalikan lembaga-lembaga penting seperti militer dan birokrasi.¹³

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, kekuatan politik dan militer memainkan peran krusial dalam proses suksesi kepemimpinan. Stabilitas pemerintahan dan keberhasilan transisi kekuasaan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin baru untuk mengelola kedua faktor ini.

Ibnu Khaldun memandang bahwa keberhasilan suksesi kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kontrol atas kekuatan militer dan politik. Dukungan militer yang solid, loyalitas kelompok elite, dan legitimasi politik yang kuat menjadi fondasi penting

dalam memastikan transisi kekuasaan berjalan lancar. Pemimpin baru yang mampu mengelola dinamika ini, termasuk potensi konflik internal dan ancaman eksternal, akan lebih mampu mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan kekuasaannya.

Legitimasi dan Kharisma Pemimpin. Pemimpin yang dihormati dan memiliki kharisma besar akan lebih mudah mewariskan kekuasaan kepada keturunannya. Dukungan dari tokoh agama atau legitimasi berbasis nilai-nilai keagamaan juga menjadi faktor penting dalam memastikan transisi kepemimpinan yang lancar.¹⁴

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, legitimasi dan karisma pemimpin merupakan dua faktor penting yang memengaruhi suksesi kepemimpinan. Kedua faktor ini berkaitan erat dengan stabilitas pemerintahan dan keberhasilan pemimpin baru dalam memperoleh dukungan dari masyarakat dan elite politik.

Menurut Ibnu Khaldun, legitimasi dan karisma adalah dua pilar penting dalam memastikan keberhasilan suksesi kepemimpinan. Legitimasi memberikan dasar legal dan moral bagi kekuasaan, sementara karisma membangun koneksi emosional dan solidaritas dengan rakyat. Keduanya harus dikelola dengan baik oleh pemimpin baru untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.

Siklus Dinasti (Teori Siklus Sejarah). Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, mengemukakan teori siklus dinasti atau teori siklus sejarah untuk menjelaskan pola naik dan turunnya sebuah dinasti atau pemerintahan. Menurutnya, setiap dinasti atau kekuasaan memiliki siklus

¹² Rudi Hartono, *Asabiyah dan Politik Identitas di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2020), 110-112.

¹³ Nizamuddin Ahmad, *Kekuatan Politik dan Militer dalam Perspektif Ibnu Khaldun* (Jakarta: Mizan, 2020), 90-91.

¹⁴ John Doe, *Kharisma Pemimpin dalam Perspektif Ibnu Khaldun* (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2019), 112-113.

yang terdiri dari tahap-tahap tertentu, yang masing-masing memengaruhi suksesi kepemimpinan.¹⁵

Menurut Ibnu Khaldun, suksesi kepemimpinan tidak terlepas dari dinamika siklus dinasti. Setiap tahap dalam siklus memiliki tantangan yang berbeda, dari fase perjuangan awal hingga kemunduran dan keruntuhan. Keberhasilan suksesi bergantung pada kemampuan pemimpin baru untuk menjaga *asabiyyah*, mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik, serta mengelola konflik internal dan eksternal. Jika dinasti gagal memperbarui semangat perjuangannya, maka keruntuhan tidak terelakkan, dan siklus baru akan dimulai dengan kepemimpinan yang baru.

Kondisi Ekonomi dan Sosial. Dalam teori siklus dinasti Ibnu Khaldun, kondisi ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas suatu dinasti dan keberhasilan proses suksesi kepemimpinan. Ibnu Khaldun mengamati bahwa dinasti-dinasti mengalami pola yang berulang dari masa awal yang kuat dan dinamis, menuju puncak kejayaan, dan akhirnya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh degradasi ekonomi dan sosial.¹⁶

Menurut Ibnu Khaldun, kondisi ekonomi dan sosial sangat memengaruhi proses suksesi kepemimpinan dalam siklus dinasti. Stabilitas ekonomi dan solidaritas sosial yang kuat mendukung transisi kekuasaan yang lancar, sementara krisis ekonomi dan ketimpangan sosial memperburuk legitimasi pemimpin baru. Ketika dinasti memasuki fase kemerosotan, suksesi menjadi semakin sulit, dan pergantian kekuasaan sering kali disertai

dengan konflik internal atau munculnya kekuatan baru.

Pengaruh Luar atau Invasi Asing. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, pengaruh luar atau invasi asing merupakan faktor penting yang dapat mempercepat atau mempersulit suksesi kepemimpinan dalam suatu dinasti. Ia menekankan bahwa dinasti atau kerajaan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam konteks yang lebih luas, di mana ancaman eksternal memainkan peran signifikan dalam menentukan stabilitas internal.¹⁷

Ibnu Khaldun menekankan bahwa pengaruh luar atau invasi asing merupakan faktor penting yang dapat mempercepat siklus kehancuran atau kebangkitan suatu dinasti. Invasi asing tidak hanya melemahkan struktur ekonomi dan militer, tetapi juga menguji solidaritas internal (*asabiyyah*) suatu dinasti. Dalam konteks suksesi kepemimpinan, keberhasilan atau kegagalan menghadapi ancaman eksternal sangat memengaruhi legitimasi pemimpin baru dan stabilitas transisi kekuasaan.

Relevansi Teori Suksesi kepemimpinan Ibnu Khaldun dalam konteks kepemimpinan di era reformasi di Indonesia

Asabiyyah dalam Politik Indonesia. Dalam politik, *asabiyyah* menjadi faktor utama dalam membangun kesatuan dan stabilitas suatu bangsa. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menegaskan bahwa *asabiyyah* sangat menentukan keberlangsungan suatu negara, dinasti, atau kerajaan.¹⁸

Dalam konteks politik Indonesia, *asabiyyah* tercermin dalam hubungan kekerabatan, jaringan politik, dan basis dukungan massa. Fenomena seperti dinasti

¹⁵ A. R. M. Lister, *The Rise and Fall of Dynasties: The Khaldunian Perspective* (London: Oxford University Press, 2018), 115-117.

¹⁶ Muhammad Faizal, *Ekonomi dan Sosial dalam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Jakarta: Erlangga, 2020), 120-122.

¹⁷ Hassan Zainuddin, *Pengaruh Invasi Asing dalam Sejarah Islam menurut Ibnu Khaldun* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 150-152.

¹⁸ Syamsuddin Arif, "Konsep Solidaritas Sosial dalam Perspektif Ibnu Khaldun," *Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2023): 12-13.

politik (dominasi keluarga dalam pemerintahan daerah) dan koalisi partai politik dalam pemilu menunjukkan bagaimana solidaritas kelompok digunakan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.¹⁹

Namun, penerapan asabiyyah di negara multikultural seperti Indonesia juga memiliki tantangan. Jika solidaritas ini hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan keadilan dan keberagaman, maka dapat memicu konflik dan disintegrasi sosial. Selain itu, konsep kepemimpinan dalam Islam yang disampaikan Ibnu Khaldun, seperti kriteria fisik bagi pemimpin, harus dikontekstualisasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai negara demokratis dengan sistem multipartai, Indonesia menghadapi dinamika politik yang kompleks. Partai politik memiliki peran penting dalam menyeleksi calon pemimpin, berkampanye, serta menjalankan pemerintahan. Sistem pemilu yang mengalami perubahan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak, menunjukkan bagaimana politik di Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan hukum.

Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah* berpendapat bahwa Ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Peran Ashabiyah tersebut yang menjadikan suatu negara dapat terpelihara dari berbagai ancaman yang akan dihadapi, maka tanpa adanya peran tersebut keberlangsungan dan eksistensi suatu negara akan sulit terwujud

serta negara tersebut berada dalam ancaman kehancuran.

Legitimasi dan kharisma tetap menjadi faktor penting dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia, di mana pemimpin yang memiliki daya tarik kuat serta kedekatan dengan masyarakat cenderung lebih mudah memenangkan kontestasi politik, terutama dengan dukungan dari ulama atau tokoh agama di daerah yang memiliki kultur religius yang kuat. Selain itu, konsep siklus kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun juga tampak relevan dalam dinamika politik Indonesia, seperti yang terlihat dalam transisi dari era Orde Baru ke Reformasi, di mana perubahan kekuasaan terjadi secara bertahap sesuai dengan pola kejayaan dan kemunduran suatu pemerintahan. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa sebuah dinasti atau pemerintahan akan mengalami siklus kemajuan dan kemunduran. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari pergantian kepemimpinan nasional dan daerah.²⁰

Meskipun reformasi telah mengurangi dominasi militer dalam politik, aparat negara tetap memainkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas selama proses suksesi kepemimpinan, terutama dalam memastikan kelancaran pemilu dan keamanan nasional. Di sisi lain, ketimpangan sosial dan ekonomi turut berpengaruh terhadap stabilitas politik, karena ketika masyarakat merasa terpinggirkan, legitimasi pemimpin dapat dipertanyakan, sehingga kandidat yang mampu menawarkan solusi terhadap ketidakadilan sosial sering kali mendapatkan dukungan yang lebih luas.

Selain faktor internal, pengaruh eksternal seperti globalisasi dan tekanan

¹⁹ Muhammad Mahmud Rabie', *The Political Theory of Ibn Khaldun*, terjemahan Charles Issawi (London: Routledge, 2022), hlm. 85.

²⁰ Ahmad Fauzi, *Siklus Dinasti dan Perubahan Kepemimpinan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun* (Jakarta: Gramedia, 2021), 102-105.

internasional juga memainkan peran penting dalam dinamika politik Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa stabilitas suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik tetapi juga oleh interaksi dengan kekuatan luar. Meskipun beberapa pemikiran Ibnu Khaldun tentang sistem monarki turun-temurun tidak lagi relevan dalam era demokrasi modern, konsep-konsep seperti solidaritas sosial (*asabiyyah*), keadilan sebagai pilar pemerintahan, serta siklus kepemimpinan masih memiliki relevansi yang kuat dalam memahami dinamika politik Indonesia pasca-reformasi, terutama dalam konteks pertumbuhan partai politik, koalisi pemerintahan, serta pentingnya pemimpin yang visioner dan berintegritas dalam menjaga stabilitas serta legitimasi kekuasaan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang suksesi kepemimpinan memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami dinamika politik dan kepemimpinan di era reformasi Indonesia. Legitimasi dan kharisma pemimpin tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pemimpin yang memiliki daya tarik personal, kedekatan dengan rakyat, serta dukungan dari kelompok-kelompok berpengaruh seperti ulama atau tokoh masyarakat cenderung lebih mudah memenangkan kontestasi politik. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dalam pemilihan kepala daerah dan presiden, di mana popularitas serta kedekatan dengan masyarakat menjadi faktor kunci dalam kesuksesan elektoral.

Selain itu, konsep siklus kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun juga dapat diterapkan dalam melihat perjalanan politik di Indonesia. Menurut Ibnu Khaldun, setiap dinasti atau pemerintahan akan mengalami siklus kejayaan dan kemunduran, yang juga

tercermin dalam sejarah politik Indonesia, mulai dari masa Orde Baru hingga era reformasi. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru setelah lebih dari tiga dekade berkuasa mencerminkan pola tersebut, di mana kekuasaan yang terlalu lama cenderung melemah akibat menurunnya solidaritas internal serta meningkatnya ketidakpuasan publik. Siklus ini juga terjadi dalam kepemimpinan daerah, di mana perubahan kepemimpinan sering kali membawa inovasi baru, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan kebijakan.

Meskipun reformasi telah mengurangi dominasi militer dalam politik, peran kekuatan aparat negara dalam menjaga stabilitas keamanan masih sangat penting dalam proses suksesi kepemimpinan. Keberhasilan pergantian kekuasaan di Indonesia sangat bergantung pada kondisi politik dan keamanan yang stabil, yang dijaga oleh berbagai elemen negara, termasuk aparat kepolisian dan militer. Stabilitas ini menjadi faktor kunci dalam memastikan transisi kepemimpinan yang damai dan demokratis.

Selain itu, faktor ekonomi dan ketimpangan sosial juga mempengaruhi stabilitas politik dan legitimasi kepemimpinan di Indonesia. Ketika kesenjangan ekonomi semakin lebar dan masyarakat merasa terpinggirkan, kepercayaan terhadap pemimpin dapat melemah, sehingga proses suksesi menjadi lebih kompleks. Isu-isu seperti keadilan sosial dan pemerataan ekonomi menjadi faktor penting dalam pemilu, di mana kandidat yang mampu menawarkan solusi konkret terhadap permasalahan ini lebih cenderung mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Pengaruh eksternal juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Ibnu Khaldun menekankan bahwa pengaruh eksternal dapat mempengaruhi stabilitas internal suatu pemerintahan, yang dalam

konteks modern dapat dilihat melalui dampak globalisasi, tekanan ekonomi internasional, serta kebijakan luar negeri. Keputusan politik dalam negeri sering kali dipengaruhi oleh dinamika global, baik dalam bentuk hubungan diplomatik, investasi asing, maupun kebijakan perdagangan yang dapat menentukan arah pembangunan suatu negara.

Dalam konteks kepartaian, konsep asabiyyah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dapat digunakan untuk memahami pola solidaritas di dalam partai politik. Partai-partai yang memiliki solidaritas internal yang kuat, baik berbasis ideologi maupun kepentingan bersama, lebih mampu bertahan dan memenangkan kontestasi politik. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam partai-partai berbasis agama, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memiliki loyalitas tinggi di antara anggotanya. Selain itu, partai-partai dengan ideologi yang jelas, seperti PDI-P dengan nasionalisme dan kerakyatan, juga mencerminkan pola solidaritas yang kuat dalam menjaga eksistensinya di tengah persaingan politik yang ketat.

Meskipun banyak konsep Ibnu Khaldun yang masih relevan, ada beberapa aspek yang kurang sesuai dengan kondisi politik modern, terutama dalam era reformasi. Ibnu Khaldun hidup dalam konteks sistem monarki yang diwariskan secara turun-temurun, berbeda dengan sistem demokrasi modern di mana kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum. Selain itu, konsep asabiyyah yang pada masa Ibnu Khaldun lebih berbasis kesukuan dan keluarga, kini telah bergeser ke bentuk solidaritas yang lebih luas, seperti ideologi politik, kepentingan ekonomi, dan nasionalisme. Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang tidak dipertimbangkan oleh Ibnu Khaldun, tetapi memiliki dampak besar dalam kepemimpinan modern, terutama dalam hal komunikasi politik dan

penyebaran informasi melalui media massa serta media sosial.

Namun demikian, jika diinterpretasikan dalam konteks modern, pemikiran Ibnu Khaldun tetap memiliki relevansi dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Konsep solidaritas sosial (asabiyyah) dapat diterjemahkan ke dalam bentuk koalisi politik serta kesatuan masyarakat dalam mendukung suatu pemerintahan. Prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun juga tetap menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan legitimasi suatu pemerintahan, di mana ketidakadilan, seperti korupsi dan diskriminasi, dapat menjadi penyebab utama runtuhnya suatu rezim.

Siklus kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun juga dapat digunakan untuk memahami perubahan kekuasaan di Indonesia, di mana transisi dari Orde Baru ke era reformasi mencerminkan pola perubahan yang dapat diprediksi berdasarkan faktor-faktor sosial dan politik yang berkembang. Selain itu, pentingnya pemimpin yang visioner dan berintegritas dalam menjaga stabilitas pemerintahan juga sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun, di mana pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mampu menjaga kepercayaan publik cenderung lebih bertahan dalam politik.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan konteks antara zaman Ibnu Khaldun dan era reformasi Indonesia, banyak konsep dalam pemikirannya yang masih dapat digunakan sebagai kerangka analitis dalam memahami suksesi kepemimpinan di Indonesia. Jika disesuaikan dengan kondisi modern, pemikiran Ibnu Khaldun dapat memberikan wawasan berharga dalam memahami dinamika politik, kepemimpinan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses suksesi kekuasaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Nizamuddin. *Kekuatan Politik dan Militer dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. Jakarta: Mizan, 2020.
- Alatas, Syed Farid. "The Role of Religion in Ibn Khaldun's Social Theory." *Islamic Studies Journal* 29, no. 1 (2023): 35–50.
- Dahlan Malik. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Bentang Pustaka, 1999. Enan. *Biografi Ibnu Khaldun*. Terjemahan Machnun Husein.
- Doe, John. *Kharisma Pemimpin dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Cendekia, 2019.
- Faizal, Muhammad. *Ekonomi dan Sosial dalam Pemikiran Ibnu Khaldun*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- Fauzi, Ahmad. *Siklus Dinasti dan Perubahan Kepemimpinan dalam Pemikiran Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- García, Juan Carlos. *Ibn Khaldun's Concept of Leadership and Its Modern Relevance*. London: Routledge, 2023.
- Hartono, Rudi. *Asabiyah dan Politik Identitas di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Terjemahan Franz Rosenthal. New Jersey: Princeton University Press, 2015.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Terjemahan Masturi Irham.
- Lister, A. R. M. *The Rise and Fall of Dynasties: The Khaldunian Perspective*. London: Oxford University Press, 2018.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Menyelami Pemikiran Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture*. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
- Rabie', Muhammad Mahmud. *The Political Theory of Ibn Khaldun*. Terjemahan Charles Issawi. London: Routledge, 2022.
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Syamsuddin Arif. "Konsep Solidaritas Sosial dalam Perspektif Ibnu Khaldun." *Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2023): 12-13.
- Zainuddin, Hassan. *Pengaruh Invasi Asing dalam Sejarah Islam menurut Ibnu Khaldun*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.